

Mengurai Fenomena Perdagangan Perempuan di Negara-negara Teluk dan Timur Dekat

Yusnarida Eka Nizmi¹

Abstract

Women trafficking rises in three ways. First, job vacancy or salary. When someone desperates in economic condition, fake job can be easily success in recruiting a thousand workers by giving fake promise in particular countries. Women trafficking are also running well because of fake marriage. In some countries which life extremely difficult for unmarried women and marriage is the only way to get convenience, social rights and avoid bullying in her whole life. The second, women trafficking exist because they are sold by their family. Poverty, desperate, and unemployment drive many family sell their children in women trafficking. Finally, love story. Many victims are forced to get involved in women trafficking because of love. These three conditions are the main reason why gulf states and near east become destination for women trafficking.

Keywords: *human trafficking, women trafficking, cheap labour, gulf states, near east*

¹ Dosen di Universitas Negeri Riau. Untuk tujuan akademik penulis dapat dihubungi di email : eka_nizmi@yahoo.com

Pendahuluan

“Mereka menempatkan kami di sebuah hotel. Mereka memiliki ketertarikan khusus terhadap gadis-gadis muda yang masih perawan. Mereka menjual gadis-gadis muda tersebut kepada sekh-sekh arab yang kaya dengan harga yang luar biasa untuk layanan seks satu malam. Sekh-sekh tersebut biasanya memberi hadiah kepada para mucikari yang membawa gadis-gadis perawan kepada mereka. Dalam beberapa kasus, gadis-gadis perawan tersebut juga ada yang mendapatkan hadiah khusus dari syekh yang mereka layani. Salah seorang teman saya yang pada usia 13 tahun telah dijual kepada pria arab yang kaya. Pria arab kaya tersebut bertanya hadiah apa yang diinginkan oleh si gadis. Gadis tersebut menjawab dia menginginkan dua karung tepung untuk makan”. (Parrot and Cummings, 2008, 14-15).

Shahnara, seorang korban perdagangan seks di Uni Emirat Arab negara Teluk yang kaya, menggambarkan bagaimana perempuan dan anak-anak diterbangkan ke negara Teluk tersebut dan dipaksa masuk dalam lingkaran perdagangan seks. Mayoritas para penjual perempuan dan anak-anak tersebut adalah kaum pria, dan PBB memperkirakan bahwa dua pertiga korban mereka adalah kaum perempuan dan gadis-gadis muda sekitar tiga belas persen (UNODC, 2009). Rata-rata 29 juta orang mengalami perbudakan modern di

seluruh dunia, dan sekitar 4 persen di duga menjadi korban perbudakan seks. 4 persen dari perdagangan seks ini, rata-rata 40 persen dari seluruh keuntungan berasal dari tenaga kerja paksa (Kara, 2008). Perdagangan seks global semakin berkembang karena keuntungan yang diperoleh sangat menjanjikan, dan banyak negara tidak mampu atau bahkan tidak ingin untuk mengurangi atau memutus rantai perdagangan seks. Jumlah perempuan dan gadis-gadis muda yang masuk dalam jaringan perdagangan seks ini setiap tahunnya terus bertambah dari 1.2 juta sampai 4 juta (Dunlop, 2008). Meskipun perkiraan ini masih sangat dini, namun tidak bisa dibantah bahwa perdagangan seks jelas memberi keuntungan yang luar biasa karena akselerasi globalisasi: keuntungan perdagangan seks ini sekitar 12 juta dollar pertahunnya, sedikit kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan

perdagangan orang dan narkoba (Dickenson, 2006).

Pembahasan

Konsep Perdagangan Orang

Perdagangan orang merupakan fenomena internasional, hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan mengenai perdagangan orang. Menurut IOM (2009) secara global dilaporkan bahwa perdagangan orang di seluruh dunia memakan korban 4 sampai enam ratus juta setiap tahunnya. Mayoritas korban perdagangan orang itu dalam bidang seks. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melaporkan sekitar 70 persen korban perdagangan seks adalah kaum perempuan. Dari 70 persen itu, 50 persen korban berusia di bawah 18 tahun. Para korban perdagangan seks kemungkinan besar dipaksa masuk dalam prostitusi, pornografi, prostitusi untuk militer, prostitusi dengan kedok perkawinan, dan prostitusi untuk industri wisata seks.

Fenomena diatas dapat terjadi disebabkan banyak negara yang salah memahami defenisi perdagangan orang atau gagal mendeteksi dan menangani perdagangan orang yang muncul di wilayah perbatasan mereka. Pada dasarnya, perdagangan orang bukanlah sebuah fenomena baru. Sejak akhir abad kesembilan belas perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan sudah menjadi persoalan internasional. Konsep mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perdagangan perempuan masih menjadi diskusi yang terus berlangsung. Banyak pengambil kebijakan masih memperdebatkan apa arti perdagangan orang yang sebenarnya. *Trafficking Victims Protection Act* (2000) PBB, mengartikan perdagangan orang secara umum sebagai berikut.

The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons by means of threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power, or of a position of

vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.

Defenisi yang dibuat oleh PBB mengenai perdagangan orang sebagai “rekrutmen, transfer, atau menempatkan dan menerima individu yang disertai dengan ancaman atau paksaan.” Defenisi ini sama dengan defenisi yang digunakan oleh U.S. State Department’s Trafficking Victims Protection Act 2000 (yang disebut dengan TVPA) yang menggambarkan beberapa bentuk perdagangan orang yakni:” (a) perdagangan seks dengan indikasi seks komersial yang disertai dengan adanya paksaan, tekanan atau individu tersebut dipaksa untuk melakukan aktivitas seks sebelum berusia 18 tahun; atau (b) proses rekrutmen, transportasi dan

pengawasan terhadap seorang pekerja melalui tekanan, paksaan, siksaan untuk tujuan perbudakan”. (U.S Department of State, 2008).

Kongress Amerika Serikat mengesahkan TVPA ini pada Oktober 2000 sebagai upaya untuk mendapatkan defenisi yang lengkap mengenai perdagangan orang dan menjadikan isu perdagangan orang sebagai isu nasional dan internasional. Setelah 2000 TVPA, kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi di Amerika Serikat dan negara lain menjadi lebih banyak diulas, dan banyak undang-undang terkait perdangan orang dibuat di era presiden Clinton. Pada tahun 2003 presiden George W. Bush menandatangani amandemen *Trafficking Victims Protection Reauthorization Act* (TVPRA), sebagai bukti pemerintah Amerika Serikat sangat respon dalam memberantas perdagangan orang. Pada tahun 2005, melalui TVPRA pemerintah Amerika Serikat memproklamirkan “dukungan penuh untuk menghentikan

kejahatan perdagangan orang, dan melarang keras “berbagai bentuk perdagangan orang”. Kategori perdagangan orang termasuk rekrutmen dan sebagainya dilakukan untuk tiga tujuan utama (1) perdagangan orang untuk tenaga kerja, (2) perdagangan orang untuk aktivitas seks komersial, dan (3) perdagangan orang dengan korban dibawah usia 18 tahun. Penting untuk dicatat bahwa anak-anak dibawah usia 18 tahun tidak diperbolehkan pindah dari satu negara ke negara yang lain tanpa alasan yang jelas dan pendampingan keluarga, dan kalau hal ini terjadi, ini dianggap sebagai tindakan perdagangan orang. Keluarga atau pihak yang mendampingi anak dibawah usia 18 tahun akan mendapatkan hukuman ketika membawa anak untuk tujuan tenaga kerja paksa atau eksploitasi seksual (UNODC, 2006).

Kunci persoalan dari berbagai persoalan terkait dengan perdagangan orang adalah defenisi perdagangan orang itu sendiri. Persoalan lain adalah tidak ada

metode khusus dan resmi untuk mengumpulkan informasi terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korban serta tidak ada satu pun departemen atau agensi di dunia yang khusus bertanggung jawab mengumpulkan data dan informasi perdagangan orang atau para pelaku perdagangan orang. Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dengan tegas menyatakan bahwa seluruh manusia dilahirkan bebas, dan tidak ada seorangpun yang terkurung dalam perbudakan, oleh karena itu, setiap orang memiliki hak untuk bebas termasuk bebas memilih pekerjaan; namun perdagangan orang mengabaikan hak-hak dasar tersebut. Pada akhirnya, perdagangan orang terutama untuk tujuan seks adalah masalah yang terjadi di hampir seluruh negara. Para korban perdagangan seks adalah pria, perempuan, dan anak-anak. Para korban ini mendapatkan paksaan berupa kekerasan fisik atau ancaman untuk melayani jasa seks demi keuntungan

pihak-pihak yang memperdagangkan mereka.

Negara-Negara Teluk dan Perdagangan Orang

Wilayah Teluk merupakan salah satu wilayah dengan jumlah tenaga kerja luar negeri terbesar di seluruh dunia. Kaum Perempuan mewakili 30 persen dari rata-rata 10 juta pekerja migran di Timur Dekat. Sejumlah kaum perempuan ini dipaksa menjadi pekerja seks dan mengalami siksaan seksual ketika menjadi pekerja domestik. Anti Slavery International mencatat bahwa di negara-negara Teluk, “ para pekerja domestik yang berasal dari luar negara Teluk banyak bekerja sebagai pekerja di rumah-rumah” (2006, 5) Keuntungan yang luar biasa dari sektor minyak yang beredar di wilayah Teluk dimulai pada tahun 1970 an dan memberi pengaruh terhadap peningkatan jumlah imigran dari wilayah-wilayah miskin. Pada dasarnya negara-negara Teluk menerima tenaga kerja baik yang memiliki keahlian maupun yang tidak

memiliki keahlian untuk membangun ekonomi baru, kaum perempuan migran dari Bangladesh, Thailand, dan Filipina juga termasuk Indonesia mengisi formasi permintaan tenaga kerja untuk domestik.

Negara-negara Teluk banyak mempekerjakan pekerja asing untuk pekerjaan domestik seperti pembantu rumah tangga, pengasuh anak, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang saat ini menjadi simbol dari “ identitas masyarakat kelas menengah” (Anti Slavery International, 2006, 19). Situasi untuk para pekerja perempuan khususnya kurang kondusif sejak mereka menjadi “tenaga kerja informal” dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terdata di wilayah Teluk. Kondisi ini menyebabkan para pekerja domestik di negara-negara seperti Saudi Arabia secara sistematis dieksploitasi dan mengalami banyak penyimpangan/siksaan (Human Rights Watch, 2008). Meskipun Menteri Tenaga Kerja Saudi Arabia sangat menyadari persoalan ini seperti pernyataannya: “ Saya tidak mampu

memonitor delapan juta pembantu rumah tangga. Tidak ada di negara manapun, situasinya seperti yang terjadi di negara ini, komunitas kami ketagihan terhadap tenaga kerja murah dan anehnya para pekerja tersebut tidak pernah berhenti untuk datang ke sini” (93). Meskipun banyak kaum perempuan yang masuk dalam jaringan perdagangan seks global justru sangat tidak ingin berpartisipasi, sikap yang sangat ingin mencari pekerjaan dan mendapatkan keuntungan di negara-negara Teluk menyebabkan perdagangan seks terus berkembang di negara-negara Teluk dan wilayah sekitarnya.

Berdasarkan data dari Gulf Cooperation Council (GCC), Timur Dekat adalah zona transit sekaligus menjadi zona tujuan untuk perdagangan orang dari Asia, Eropa Timur dan negara-negara CIS dan beberapa negara Afrika. Sejumlah korban perdagangan orang banyak yang berasal dari Bangladesh dan Afghanistan, namun perempuan dan gadis-gadis muda yang dipaksa masuk dalam perdagangan seks

biasanya didatangkan dari Eropa, Afrika dan Asia. Di Uni Emirat Arab, banyak perempuan-perempuan dari beberapa negara yang diterbangkan ke Dubai, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperkirakan bahwa 10.000 perempuan dari Afrika, Eropa Timur, Asia Selatan dan Asia Timur, Iran, Iraq dan Marocco ” menjadi korban perdagangan seks” (Leghari, 2007, 112).

Beberapa migran ilegal masuk melalui sistem yang tidak terdeteksi yang menyebabkan banyak pekerja terjebak dalam perdagangan seks. Setelah terjebak janji manis akan upah besar yang bisa diperoleh sebagai pekerja domestik di negara Teluk, banyak para pekerja migran perempuan justru berada dalam pengawasan mucikari, yang beberapa diantaranya merupakan gang-gang yang terorganisir. Perempuan-perempuan ini dipaksa untuk menghasilkan uang di rumah-rumah bordil dan kerap mendapatkan siksaan fisik. Pemerintah Arab Saudi sendiri sayangnya tidak

meregulasi para pekerja domestik secara jelas dan teratur karena mereka berada di bawah payung sistem *Kafala* yang khusus menangani para pekerja asing, termasuk pengawasan dan perlindungan. Pada prakteknya, *kafala* menghasilkan “sebuah sistem ketergantungan antara pekerja migran dengan yang mempekerjakannya” (Anti Slavery International, 2006, 5). Di Dubai jaringan perdagangan orang dimulai dari jalur masuk bandara dengan mengabaikan pemeriksaan passports dan visa sebelum sampai ke negara tujuan mereka. Skenario ini mengindikasikan adanya keterlibatan personel maskapai penerbangan, pihak keamanan, pegawai imigrasi dalam perdagangan orang (Leghari, 2007, 100-101). Dengan kondisi ekonomi yang sangat tergantung pada tenaga kerja migran, negara seperti Uni Emirat Arab dan negara-negara Teluk lainnya akan sangat sulit untuk menghentikan praktik-praktik legal seperti ini.

Kuwait adalah negara tujuan dan transit bagi para migran yang diperuntukkan menjadi tenaga kerja paksa dan eksploitasi seksual. Khususnya, para pekerja domestik yang sangat beresiko terjebak dalam prostitusi setelah mengalami kekerasan sebagai pembantu rumah tangga. Kuwait adalah rumah yang sangat nyaman bagi para agensi tenaga kerja nakal yang mengirimkan tenaga kerja dengan keahlian yang minim ke Iraq. TIP melaporkan bahwa Kuwait termasuk dari negara “pariwisata seks” dengan mengadakan tur khusus ke negara-negara Timur Dekat lainnya dan Asia Tenggara. Disamping tidak adanya hukum untuk menjerat para pelaku perdagangan orang, Kuwait juga sangat tidak proaktif untuk menangani kasus-kasus perdagangan orang. Lebih parahnya lagi, Kuwait, sama halnya dengan negara-negara Teluk lainnya, lebih sering menghukum para korban perdagangan orang dengan cara mendeportasi dan memenjarakan para korban dibanding para pelaku perdagangan

orang sendiri (seperti mucikari, para mami dan agensi yang mengolala bisnis perdagangan seks).

Oman juga menjadi negara tujuan dan transit bagi para migran dari berbagai negara di Timur Dekat. Khususnya, Oman merupakan tempat transit bagi perempuan-perempuan dari Asia, Eropa Timur, dan Afrika Utara yang kerap menjadi korban eksploitasi seks komersil. Banyak warga negara Pakistan, baik yang memang sengaja atau dipaksa, melakukan perjalanan ke Oman sebelum diselundupkan ke negara-negara Teluk lainnya (Leghari, 2007). Oman tidak menghukum para pelaku yang terlibat dalam perdagangan orang atau berupaya untuk mengidentifikasi atau melindungi korban. Terdapat persoalan yang sangat kronis di Oman dengan tidak adanya data mengenai kasus-kasus perdagangan seks, karena banyak korban yang takut di deportasi ke tempat yang jauh lebih buruk dari Oman (TIP, 2008). Qatar adalah negara tujuan bagi para migran dari Asia,

Afrika Utara, dan negara lain Timur Dekat yang akan dipekerjakan di bisnis prostitusi. Sama dengan Oman, Qatar juga sangat miskin dengan hukum untuk mencegah dan mengidentifikasi para korban.

Perbatasan-perbatasan kerajaan Saudi Arabia sangat rentan terhadap perdagangan orang khususnya dekat Iraq dan Yaman (Leghari, 2007, 124). Saudi Arabia adalah salah satu negara tujuan terbesar bagi para pekerja dengan keahlian minim khususnya sebagai pembantu rumah tangga yang datang dari seluruh belahan dunia. Berdasarkan data dari TIP, perempuan-perempuan dari Yaman, Marocco, Pakistan, Nigeria, Ethiopia, Tajikistan dan Thailand diperjualbelikan ke Saudi Arabia untuk tujuan eksploitasi seks komersil. Beberapa perempuan di Saudi Arabia dilaporkan diculik dan dipaksa masuk dalam perdagangan seks setelah ditipu oleh majikannya. Dengan pemberlakuan sistem *Kafala*, pemerintah Saudi Arabia mencoba untuk membuat

perlindungan bagi para pekerja, perempuan asing, khususnya para pekerja domestik (pembantu rumah tangga) yang berasal dari Asia untuk mendapat perlakuan yang baik dari para majikan dan tidak melakukan kekerasan fisik dan seksual. Menteri Sosial Saudi Arabia mencoba mengurai persoalan, “ kontrak-kontrak kerja yang tidak jelas, para agen tenaga kerja di Saudi Arabia yang tidak jujur...beberapa majikan memperlakukan para pekerjanya layaknya budak, ada juga majikan yang memperlakukan para pekerjanya layaknya keluarga” (Human Rights Watch, 2008, 22).

Layaknya “ Las Vegas yang terdapat di Timur Tengah”, Uni Emirat Arab, khususnya Dubai, merupakan tempat yang tepat bagi bisnis perdagangan orang dan masih menjadi tempat tujuan dan transit bagi para pekerja ilegal dan prostitusi. Dubai pada tahun 2008 berada pada Tier 2 status karena banyaknya perempuan-perempuan dari Asia Tengah, Eropa Timur, Asia Selatan dan Asia

Tenggara yang mengisi rumah-rumah bordil di Dubai. Data dari TIP diketahui bahwa perempuan sering direkrut untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan palsu sebelum akhirnya dipaksa masuk dalam jaringan perdagangan seks. Uni Emirat Arab mencoba untuk keluar dari status Tier 2 dengan membenahi hukum dan mempekerjakan ratusan pengawas tenaga kerja terlatih untuk mengidentifikasi pola-pola perdagangan orang. Namun, sama seperti dengan negara-negara Teluk lainnya, Uni Emirat Arab masih terus berlanjut mengkriminalkan korban-korban perdagangan orang dengan persepsi bahwa para korban tersebut memang dengan sukarela bergabung dalam jaringan perdagangan seks. Sebagai tambahan, Uni Emirat Arab juga menolak untuk melakukan kampanye kepedulian publik mengenai persoalan perdagangan orang.

Negara Teluk lainnya adalah Yaman yang menjadi negara asal tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan,

anak-anak dipaksa untuk mengemis, dan kaum perempuannya masuk dalam lingkaran perdagangan seks. TIP melaporkan bahwa banyak perempuan Yaman yang dijual ke Saudi Arabia untuk eksploitasi seksual. Yaman juga merupakan negara yang mengalami peningkatan jumlah anak jalanan yang sangat rentan terhadap terjadinya kekerasan. Yaman sadar akan hal ini, sehingga memutuskan untuk membuka penampungan bagi anak-anak yang menjadi korban prostitusi. Negara Teluk yang dikenal sebagai negara kaya, justru sedikit sekali memberikan perhatian terhadap masalah ini, dan ini menjelaskan mengapa negara-negara Teluk masuk pada kategori Tier 3.

Timur Dekat dan Perdagangan Seks

Negara yang lebih miskin di Timur Dekat, tidak termasuk Israel, justru menyandarkan pergerakan ekonominya dengan tenaga kerja murah dan korban-korban eksploitasi seks komersil. Iran dan Syria termasuk kategori Tier 3: Mesir dan

Jordan masuk kategori Tier 2 Watch List; Israel dan Lebanon menduduki posisi Tier 2. Namun, negara yang paling banyak menyimpan persoalan adalah Iraq. TIP belum dapat mengkategorikan Iraq masuk pada posisi berapa karena Iraq masih dalam transisi, dan situasi saat ini di Iraq membuat kaum pria, perempuan dan anak-anak rentan terhadap perdagangan orang. TIP mencatat bahwa anak-anak merupakan target khusus bagi eksploitasi seksual dan perdagangan orang karena negara dipenuhi oleh kelompok-kelompok kriminal dan panti-panti yatim piatu yang diorganisir oleh kelompok kriminal. The Organization of Women's Freedom melaporkan bahwa 3500 perempuan hilang dari Iraq sejak adanya pendudukan militer (IRIN, 2006). Sebagai akibatnya, beberapa negara mengeluarkan larangan untuk warganya melakukan perjalanan ke Iraq karena takut diculik atau menjadi korban perdagangan orang. Para pelaku perdagangan orang ini biasanya bekerja untuk mengeluarkan

perempuan-perempuan Iraq ini ke Syria dan Uni Emirat Arab.

Syria termasuk Tier 3 karena para pelaku perdagangan orang masih sangat bebas melewati perbatasan Iraq, dan Syria masih menjadi negara tujuan dan transit bagi perempuan dan anak-anak yang dipaksa menjadi tenaga kerja paksa dan eksploitasi seksual. Para pengungsi Iraq, perempuan dari Somalia, Russia, Asia Tengah dan Eropa Timur menjadikan Syria tujuan untuk wisata seks di berbagai negara Timur Dekat. Seorang pekerja UNHCR di Damascus menyatakan bahwa sangat tidak mungkin memutus persoalan perdagangan orang dari Iraq ke Syria karena “ persoalan ini merupakan sesuatu yang terendap karena orang sangat takut untuk membicarakan hal ini” (IRIN, 2006).

Negara Syria tidak aktif memproses hukum kejahatan-kejahatan perdagangan orang meskipun undang-undangnya telah ada. Seperti banyak negara Tier 3 lainnya, ketiadaan hukum

bukanlah persoalan utama, namun lebih pada tidak adanya keinginan untuk bertindak. Lebih buruknya lagi, Syria lebih sering melakukan penangkapan terhadap para korban dibanding melakukan penahanan terhadap para penjual korban tersebut. Iran, negara Tier 3 di Timur Dekat, merupakan negara sumber, transit, dan sekaligus negara tujuan perdagangan orang. Negara yang merupakan dimana kaum perempuan dan anak-anak menjadi korban perdagangan seks. Kaum perempuan Iran diperdagangkan secara internal dalam negeri Iran sendiri dikarenakan adanya perkawinan paksa atau akibat terjerat hutang dan diperdagangkan keluar Iran dengan tujuan negara Timur Dekat lainnya dan Eropa untuk tujuan eksploitasi seksual. TIP menyatakan bahwa pemerintah Iran memenjarakan, memukuk, dan bahkan mengeksekusi perempuan-perempuan korban perdagangan orang.

Mesir masuk kategori Tier 2 Watch List selama tiga tahun terakhir karena

kegagalan pemerintahnya dalam menginvestigasi dan memutus rantai kejahatan perdagangan orang. Mesir adalah negara transit bagi perempuan-perempuan dari Russia, Asia Tengah dan Eropa Timur yang memang sengaja dipekerjakan untuk eksploitasi seksual di Israel. Kairo diperkirakan memiliki satu juta “anak jalanan” yang jelas sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual dan prostitusi. TIP melaporkan bahwa penduduk negara Teluk biasa melakukan perjalanan ke Mesir untuk membeli “perkawinan kontrak” dengan gadis-gadis dibawah umur yang sengaja dijual oleh orang tua atau para mucikari. Mesir juga dikenal dengan tuan rumah bagi wisata seks diseluruh dunia.

Jordan juga merupakan negara yang masuk daftar pengawasan karena gagal memerangi perdagangan orang atau menangani kasus-kasus terkait dengan eksploitasi tenaga kerja domestik. Jordan merupakan negara transit dan negara tujuan bagi tenaga kerja pria dan wanita

dari seluruh Asia yang dipaksa sebagai tenaga kerja paksa. Sebagai negara yang berbatasan dengan Iraq, para pelaku jual beli orang semakin gencar menyalurkan tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan dengan janji-janji palsu. TIP juga melabelkan Jordan sebagai negara tujuan prostitusi dari Eropa Timur dan Afrika Utara. Pemerintah Philipina melarang warganya melakukan perjalanan ke Jordan untuk mencari pekerjaan sampai Jordan serius menanggapi dan menangani isu kekerasan terhadap para tenaga kerja domestiknya. Sepanjang tidak ada upaya untuk menghentikan gelombang perdagangan orang, baik Mesir maupun Jordan masih tetap akan menjadi negara yang berstatus awas di masa-masa yang akan datang.

Negara-negara yang masuk kategori Tier 2 di Timur Dekat adalah Lebanon dan Israel. Lebanon merupakan negara tujuan bagi perempuan-perempuan yang dijual dari Asia dan Afrika sama demikian juga dengan perempuan-

perempuan dari Eropa Timur dan Syria yang terjerumus dalam perdagangan seks (Anti-Slavery International, 2006). Perempuan-perempuan yang berasal dari negara luar Timur Dekat, merupakan target yang potensial untuk mendapatkan ancaman, karena banyak dari mereka, seluruh dokumen penting seperti passport dan visa ditahan oleh para penjual/mucikarnya. TIP juga melaporkan bahwa anak-anak juga diperjualbelikan untuk menjadi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Israel merupakan negara tujuan bagi perempuan dan laki-laki yang diperjualbelikan untuk menjadi tenaga kerja maupun eksploitasi seksual. Israel menarik banyak pekerja ahli untuk bekerja di negaranya demi kemajuan ekonomi negaranya, namun dengan persyaratan harus membayar ribuan dollar. Hal ini justru membuat para pekerja terjebak hutang kepada Israel dan rentan terhadap eksploitasi. Israel mencoba untuk mengatasi persoalan prostitusi yang melibatkan perempuan-perempuan dari

Russia, Eropa Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan China. TIP mencatat bahwa perempuan-perempuan Israel juga menjadi korban perdagangan orang, hal ini menunjukkan bahwa upaya Israel masih sangat minim dalam memerangi perdagangan orang.

Penutup

Negara Teluk yang kaya dengan pundi-pundi finansial, namun ternyata minim dalam upaya penanganan perdagangan orang, khususnya eksploitasi seksual. PBB, Departemen Luar Negeri dan NGO-NGO menyimpulkan bahwa seluruh negara-negara Timur Dekat telah membuat aturan untuk memerangi tindak kejahatan perdagangan orang, namun tidak satu pun dari Negara Timur Dekat yang masuk kategori Tier 1. Negara-negara Teluk secara keseluruhan sangat “bergantung pada tenaga kerja murah” dan pekerja-pekerja domestik tersebut adalah target potensial kekerasan seksual. Dubai terus menarik ribuan pekerja seks, banyak dari mereka dipaksa masuk dalam

prostitusi, dan rumah-rumah bordil di negara-negara seperti Israel, Lebanon, Mesir dan Jordan menempatkan perempuan-perempuan dalam lingkaran perdagangan seks global. Siddarth Kara, seorang peneliti yang memfokuskan diri pada persoalan perbudakan dan perdagangan orang, sangat menganjurkan agar masyarakat internasional dan masing-masing negara membuat program khusus untuk mengatasi perdagangan seks. Usulan Siddarth Kara yang paling direkomendasikannya adalah adanya pengawasan dan inspeksi khusus sebagaimana layaknya tentara-tentara PBB ketika masuk pada daerah-daerah konflik (Kara and Stewart, 2009). Timur Dekat harus segera meningkatkan hukuman dan denda terhadap para pelaku perdagangan orang, mengkampanyekan kepedulian publik dan menekankan betapa mengerikannya persoalan perdagangan orang. Juru bicara untuk Qatar menyatakan bahwa “ issue perdagangan orang harus menjadi bagian dalam kurikulum di

sekolah-sekolah dan insitusi pendidikan demi meningkatkan kepedulian dan keamanan bagi masyarakat kita,” (humantrafficking.org, 2008). Perlu ditegaskan kembali bahwa sejauh ini negara-negara Timur Dekat saat ini lebih fokus pada retorika semata dibandingkan dengan aksi nyata.

Daftar Pustaka:

- Anti-Slavery international. (2006). *Trafficking in Women, Forced Labor and Domestic work in the Context of the Middle East and Gulf Region*.
- Dickenson, D. (2006).” Philosophical Assumptions and Preassumptions about Trafficking for Prostitution,” in Christien L. Van den Anker and Jeroen Doomernik (eds) *Trafficking and Women’s Rights*. New York: Palgrave Mcmillan.
- Dunlop, K. 2008.” Human Security, Sex Trafficking and Deep Structural Explanations.” *Human Security Journal*, 6 (Spring).
- Human Rights Watch. (2008).” *As If I am Not Human: “ Abuses Againts Asian Domestic Workers in Saudi Arabia*.

Humantrafficking.org. (2008).” Arab schools Urged to Teach Ills of Human Trafficking.” (Humantrafficking.org/updates/792) (8 July 2009).

IRIN: UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2006). “Sex Traffickers target women in war-torn-Iraq.” October 26, 2006. www.irinnews.org/report.aspx?reportid=61903 (8 July 2009).

Kara, S. (2008). *Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery*. NY: Columbia University.

Leghari, F. (2007). *Narcotics and Human Trafficking to the GCC States*. Gulf Research Center, Dubai.

Madslie, J. (2005). “Sex Trade’s reliance on forced labor.” BBC. (news.bbc.co.uk/1/hi/business/4532617.stm) (18 July 2009).

Parrot, A., and Cummings, N. (2008). *Sexual Enslavement of Girls and Women Worldwide*. Westport, CT: Praeger.

U.S Department State. (2008, June). *Trafficking in Persons*. Report. Washington, DC: Office to Combat and Monitor Trafficking in Persons.